

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Bandar Bakau Berkas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Community Empowerment Strategy in Bandar Bakau Area Based on Coastal Community Economic Empowerment

Muhammad Yaslan, Rd. Siti Sofro Sidiq* dan Swis Tantoro
Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, Indonesia, 28293

*Email korespondensi : sitisofrosidiq@lecturer.unri.ac.id

Diterima tanggal: 28 April 2023; Disetujui tanggal: 29 Juni 2023

ABSTRACT

Bandar Bakau is a strategic area that has the potential to be developed for community empowerment. The purpose of this research is to analyze empowerment programs that have been carried out and formulate empowerment strategies using the concept of Coastal Community Economic Empowerment. The research approach used qualitative with subject selection through purposive sampling consisting of local government officials, Bandar Bakau managers, cultural activists, and the community. Data analysis was carried out based on a descriptive framework, namely reduction, categorization, display, and conclusion drawing. The results of the study found a number of problems in developing the potential of Bandar Bakau for community empowerment, including differences in perceptions regarding the objectives and design of empowerment, non-optimal institutional management, and the commitment of stakeholders who are not in line. Empowerment carried out in the Bandar Bakau area has not fully implemented PEMP principles because it is more dominant in the Top Down pattern than Bottom Up. This has implications for the less than optimal success of community empowerment. The PEMP-based strategy is carried out through a number of strategies. First, improving the structure and reorganizing existing institutions. Second, equalizing perceptions about PEMP among actors and stakeholders. Third, upholding deliberation and mutual cooperation values and developing community participation. This strategy can have a positive impact if balanced with consistent support in terms of capacity building, capitalization, and sustainable business management.

Keywords: Bandar Bakau, Empowerment, Economic, Strategy

ABSTRAK

Bandar Bakau merupakan kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian untuk menganalisis program pemberdayaan yang pernah dilakukan dan merumuskan strategi pemberdayaan menggunakan konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan pemilihan subjek melalui cara purposive sampling terdiri dari aparaturnya pemerintahan setempat, pengelola Bandar Bakau, pegiat budaya, serta masyarakat. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, kategorisasi, display, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan sejumlah masalah dalam pengembangan potensi Bandar Bakau untuk pemberdayaan masyarakat diantaranya perbedaan persepsi mengenai tujuan dan desain pemberdayaan, manajemen kelembagaan yang belum optimal, serta komitmen stakeholder yang belum sejalan. Pemberdayaan yang dilakukan di kawasan Bandar Bakau belum sepenuhnya menerapkan prinsip PEMP karena lebih dominan berpola *top down* dari pada *bottom up*. Hal ini memberikan implikasi pada kurang optimalnya keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Strategi berbasis PEMP dilakukan melalui sejumlah strategi. *Pertama*, memperbaiki struktur dan menata kembali kelembagaan yang ada. *Kedua*, penyamaan persepsi tentang PEMP diantara aktor dan stakeholder. *Ketiga*, menjunjung tinggi musyawarah dan nilai-nilai gotong royong serta pengembangan partisipasi masyarakat. Strategi ini dapat memberikan dampak positif jika diimbangi dengan konsistensi dukungan dari segi peningkatan kapasitas, permodalan, serta manajemen bisnis berkelanjutan.

Kata kunci : Bandar Bakau, Pemberdayaan, Ekonomi, Strategi,

PENDAHULUAN

Kawasan Pesisir memiliki ragam kekayaan dalam konteks sumber daya alam maupun budaya (Takarendehang et al., 2018). Ragam kekayaan yang ada dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi isu yang menarik untuk diulas. Dengan berbagai fakta bahwa kawasan pesisir memiliki potensi yang beragam, tidak semua masyarakat di wilayah tersebut hidup sejahtera (Triyani & Firdaus, 2016). Hal ini tentu berbanding terbalik dengan keadaan yang diharapkan, bahwa semua masyarakat di kawasan pesisir dapat hidup mapan serta sejahtera dengan terkelolanya potensi yang ada. Kondisi demikian merupakan satu cerminan bahwa pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir menghadapi tantangan dari sisi politik berupa implementasi kebijakan yang terkadang kurang tepat sampai pada faktor masyarakat itu sendiri yang kurang mendukung suatu program.

Wilayah Dumai masuk dalam pusat kawasan strategis nasional dan merupakan pintu gerbang penghubung antara Indonesia dengan negara tetangga

seperti Malaysia dan Singapura. Sebagai satu diantara dua PKS, Kota Dumai berkembang pesat menjadi kawasan industri. Kondisi demikian mendorong tingkat mobilitas masyarakat di Dumai sangat tinggi, untuk bekerja maupun kepentingan lain. Potensi sumber daya alam di Dumai sangat beragam, dari sektor perairan hingga objek wisata. Ekowisata Bandar Bakau menjadi salah satu destinasi unggulan di Kota Dumai. Mulai dirintis tahun 1998, bukan saja menawarkan keindahan alam, daya dukung industri kreatif di wilayah tersebut memadai, mulai dari pelaku kuliner, kerajinan, hingga kebudayaan (A. Mulyadi et al., 2021)

Pengembangan ekowisata Bandar Bakau dan ragam potensi lain yang ada di sekitarnya merupakan usaha dalam proses pemberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi. Harapan dari pengembangan akan tercapai kesejahteraan masyarakat terutama tempatan sehingga persoalan ekonomi dapat diatasi. Bandar Bakau merupakan penyangga lingkungan dari abrasi yang terjadi hampir setiap tahun. Ini menjadi potret bahwa Bandar Bakau tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga fungsi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi lapangan bahwa tujuan untuk memberdayakan dari sisi ekonomi belum terwujud.

Faktor dominan yang tampak menjadi hambatan dalam realisasi pemberdayaan masyarakat yaitu perbedaan persepsi mengenai tujuan pengembangan Bandar Bakau, komitmen unsur pemerintahan yang lemah, hingga kurangnya kemampuan dari pengurus dalam manajemen pengelolaan yang berkelanjutan. Ragam hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen merupakan kebutuhan dasar dalam merealisasikan program pemberdayaan (Novengging, 2021). Faktor berikutnya yang turut berperan yakni stabilitas internal masyarakat dan kelembagaan (Agung et al., 2022). Bila keduanya tidak terpenuhi maka sulit untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor.

Kompleksitas potensi dan masalah di pesisir dalam konteks pemberdayaan masyarakat mendorong pemerintah merumuskan suatu kerangka yang dapat dijadikan pedoman. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

merupakan pedoman yang utuh, terintegrasi, dan komprehensif dan bukan merupakan pendekatan baru. Hanya saja, konsep ini jarang sekali diwujudkan untuk proses pemberdayaan di kawasan pesisir. Padahal, bila dicermati dari sisi desain serta komponennya, PEMP berpotensi untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan karena dilakukan dengan bertumpu pada masyarakat sebagai subjek utama (Andeas & Savitri, 2016). Penelitian tentang PEMP menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mampu memberi kontribusi pada perbaikan pendapatan di Desa Taman Ayu melalui sejumlah tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian (Junaidin & Mas'ad, 2017).

Keempat tahap tersebut merupakan tahapan yang berbasis pada *Bottom Up* mengedepankan azas musyawarah mufakat. Penelitian menunjukkan hasil PEMP mampu mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan masyarakat di Kecamatan Jailolo Selatan meskipun tidak dalam jumlah yang besar (Taroreh et al., 2022). Melihat keberhasilan PEMP sebagai suatu desain pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, maka penelitian ini akan melihat pelaksanaan program pemberdayaan di kawasan Bandar Bakau serta berupaya merumuskan strategi yang dapat dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Kelurahan Pangkalan Sesai Kota Dumai dengan berdasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, Kota Dumai merupakan wilayah dalam Pusat Kawasan Strategis Nasional yang dekat dengan Malaysia. *Kedua*, Kawasan Bandar Bakau menjadi salah satu potensi alam unggulan Kota Dumai yang terletak di pelabuhan Kelurahan Pangkalan Sesai dengan kondisi belum pengelolaan yang belum optimal untuk masyarakat setempat. Subjek penelitian ini ditentukan menggunakan *purposive sampling* terdiri dari unsur Pemerintah Kelurahan Pangkalan Sesai, pengelola ekowisata, unsur penggerak budaya, pedagang dan masyarakat yang ada di sekitar Bandar Bakau dengan total sebanyak 15 orang. Pengambilan data dilaksanakan sejak bulan Desember tahun 2022 sampai bulan

Februari 2023. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder berasal dari studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan paradigma kualitatif terdiri dari reduksi, kategorisasi, display, serta penarikan kesimpulan akhir dan SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis SWOT Kondisi Objek Wisata Bandar Bakau

Bandar Bakau merupakan objek wisata diminati oleh pengunjung baik lokal maupun mancanegara dengan keindahan alam berupa hamparan bakau serta pemandangan pesisir. Sejumlah pengunjung dari beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, India dan Italia tercatat pernah berkunjung untuk sekedar menikmati pemandangan serta belajar sejarah. Dinamika yang tidak terlepas dari adanya faktor internal dan eksternal pengelolaan Bandar Bakau. Dalam konteks membedah tentang kondisi objek wisata Bandar Bakau, penulis menggunakan matrix analisis SWOT dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Analisis SWOT Kondisi Bandar Bakau

| Faktor Internal | | | |
|------------------------|----------------|---|---|
| No | Aspek | Kekuatan | Kelemahan |
| 1 | Ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> Objek wisata Bandar Bakau memiliki lokasi tepat pada pelabuhan penyeberangan yang melayani rute domestik Dumai ke Bengkalis dan Kepulauan Meranti serta rute internasional ke Malaysia maupun Singapura. Sektor Usaha Kecil dan Menengah tumbuh sebagai pendukung khususnya di bidang kuliner dengan ciri khas ikan laut serta ikan yang diperoleh dari tambak masyarakat. Beberapa rumah tangga memiliki tambak ikan serta udang untuk memenuhi permintaan pasar. Kampung Nelayan Resto yang menyajikan hidangan laut menjadi ikon kuliner di kawasan Bandar Bakau yang | <ol style="list-style-type: none"> Kurangnya penataan fisik Bandar Bakau yang membuat pengunjung tidak nyaman seperti kerapian <i>spot</i> tempat duduk. Harga makanan hidangan laut masih relatif mahal sehingga hanya kalangan tertentu (menengah atas) yang memiliki kecenderungan datang kemudian membeli hidangan tersebut. Kreativitas pelaku Usaha Kecil dan Menengah masih relatif kurang dalam menghasilkan produk sebagai daya tarik bagi pengunjung, misalnya olahan ikan untuk oleh-oleh. |

| | | | |
|----------|------------------------|--|--|
| | | ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berburu kuliner. | |
| 2 | Lingkungan Alam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vegetasi mangrove yang cukup lebat luasnya sekitar 31 hektar dengan 24 jenis mangrove. 2. Laut sekitar masih menghasilkan udang, kepiting, dan beberapa jenis <i>seafood</i> lain yang ditangkap menggunakan cara tradisional oleh nelayan setempat. 3. Pemandangan laut yang indah dengan hilir mudik perahu nelayan khususnya di sore atau menjelang malam hari. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana-prasarana untuk menikmati keindahan mangrove banyak yang rusak sehingga pengunjung tidak dapat menikmati hijaunya hamparan mangrove dengan optimal. 2. Hasil tangkapan tidak tetap dan terkadang nihil dikarenakan berbagai aktivitas perahu atau kapal yang melewati perairan sekitar Bandar Bakau 3. Pemandangan terganggu karena perilaku membuang sampah tidak tertib pada tempatnya sehingga terlihat kumuh di beberapa titik. 4. Mangrove tepian pantai telah banyak ditebang sebagai bahan baku bangunan maupun kapal, meskipun dalam jumlah yang sedikit. 5. Lingkungan kurang bersih dan banyak sampah plastik. |
| 3 | Sosial Budaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kultur Melayu Pesisir masih kental dengan hadirnya Sanggar Seni Siti Laut. 2. Kelembagaan Melayu sebagai wadah untuk mempelajari sistem sosial budaya masyarakat setempat. 3. Keramahan dari masyarakat pada orang-orang baru. 4. Ada legenda Putri Tujuh dan tempat-tempat yang terkenal dengan mitos tertentu yang menjadi daya tarik untuk dipelajari dari sisi sejarahnya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku masyarakat terhadap lingkungan Bandar Bakau kurang bijak dalam konteks kebersihan. 2. Kios-kios yang seharusnya difungsikan sebagai tempat berjualan ada yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Beberapa dari mereka menjemur pakaian di kios tersebut sehingga mengganggu pemandangan sekitar bagi pengunjung. 3. Potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan Bandar Bakau antar aktor berpengaruh di wilayah setempat. 4. Kurang optimalnya fungsi organisasi sosial atau kelompok masyarakat dalam |

- mendukung aktivitas wisata di Bandar Bakau dari sisi kreativitas maupun inovasi kegiatan. Beberapa kelompok juga sudah tidak lagi beraktivitas untuk kegiatan di Bandar Bakau.
5. Masyarakat mendirikan kios dengan konsep penataan yang kurang optimal, terlihat remang-remang dan menjorok ke dalam lokasi bakau. Kondisi demikian tampak jika malam hari, sehingga perlu penataan ulang dari sisi fisik dan konsep kios.
 1. Koordinasi internal masyarakat maupun kelompok yang ada di Bandar Bakau masih lemah.
 2. Perhatian dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola Bandar Bakau belum optimal.
 3. Pembiayaan infrastruktur fisik untuk penataan dan daya dukung optimalisasi Bandar Bakau masih kurang memadai.
- 4 Dukungan Masyarakat dan Pemerintah**
1. Masyarakat sekitar Bandar Bakau berharap objek wisata tersebut dikembangkan optimal sehingga menjadi tempat bagi mereka untuk mencari nafkah.
 2. Pegiat seni dan budaya serta tokoh masyarakat setempat mendukung optimalisasi Bandar Bakau sebagai objek wisata, karena lokasi tersebut menjadi salah satu yang terbaik di Kota Dumai.
 3. Dukungan pemerintah pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pengelola Bandar Bakau.

| Faktor Eksternal | | | |
|-------------------------|------------------------|---|--|
| No | Aspek | Peluang | Ancaman |
| 1 | Ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Bandar Bakau strategis dan termasuk kawasan sibuk. 2. Terletak tidak jauh dari pusat Kota Dumai sebagai zona bisnis. 3. Biaya perjalanan dan akses ke Bandar Bakau cukup murah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelundupan maupun transaksi barang-barang illegal 2. Hilir mudik aktivitas di pelabuhan justru mendorong generasi muda tertarik bekerja di luar negeri karena akses dari wilayah mereka sangat dekat. |
| 2 | Lingkungan Alam | Di Kota Dumai, Bandar Bakau merupakan salah satu bentang mangrove yang terbaik. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada aktivitas pengambilan bakau untuk keperluan masyarakat baik bangunan maupun perabotan lainnya. |

| | | |
|---|---|--|
| 3 Sosial Budaya | Cerita legenda dan mitos-mitos tertentu yang hanya ada di Bandar Bakau merupakan daya dukung wisata yang cukup potensial. | 2. Sampah yang dibawa arus laut menjadi persoalan serius karena terdampar di sekitaran Bandar Bakau 1. Potensi konflik antar masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian yang berjualan dan membuat kios bukan orang setempat. 2. Ancaman penyebaran narkoba dan pornografi serta berbagai produk illegal lainnya. |
| 4 Dukungan Masyarakat dan Pemerintah | Ada dukungan dari pemerintah setempat, pemerintah pusat maupun perusahaan. | 1. Dukungan yang diberikan pemerintah belum optimal dan perlu ditingkatkan. 2. Koordinasi dan komunikasi lintas sektor belum optimal dan perlu ditingkatkan. |

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan (2022).

Pada prinsipnya, Bandar Bakau merupakan kawasan strategis yang difungsikan tidak hanya sebagai objek wisata tetapi juga fungsi ekologi untuk menjaga daerah Pesisir. Potensi bencana abrasi menjadi poin penting mengapa Bandar Bakau harus dikelola dengan baik. Sementara jika dikaitkan dari sisi sosial ekonomi, Bandar Bakau diharapkan dapat berkembang optimal, menarik wisatawan, dan menjadi pusat ekonomi masyarakat Kota Dumai yang terhubung langsung dengan beberapa Kabupaten seperti Bengkalis serta Kepulauan Meranti serta mancanegara khususnya Malaysia. Kondisi demikian merupakan harapan tersendiri bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara umum di Kelurahan Pangkalan Sesai maupun yang tinggal berdekatan dengan Bandar Bakau. Akan tetapi, kita melihat dalam konteks, apakah masyarakat sudah mendapatkan manfaat optimal dari sisi sosial ekonomi dari aktivitas objek wisata Bandar Bakau? Tentu, ini merupakan sebuah pertanyaan yang menarik untuk diulas karena dalam praktiknya hanya segelintir masyarakat yang mendapatkan manfaat dari adanya objek wisata Bandar Bakau tersebut. Mereka adalah kelompok yang memiliki modal dan sebagian merupakan pendatang.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Bandar Bakau merupakan potensi pesisir yang letaknya strategis. Dalam konteks pembangunan serta pengentasan kemiskinan, wilayah pesisir dengan berbagai potensi yang dimiliki merupakan peluang besar untuk dikembangkan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, fakta berbicara hal yang berbanding terbalik, antara harapan dan kenyataan dimana masih banyak ditemukan masyarakat dengan ekonomi yang rendah serta belum dapat merasakan keuntungan dari adanya suatu potensi pesisir yang sudah dikembangkan (Achmad, 2022). Ini menjadi kondisi yang hampir dirasakan oleh daerah pesisir lain di Indonesia, bahwa tata kelola pemanfaatan potensi yang ada berbenturan dengan kepentingan politik (Manaf, 2021) sehingga terkadang menimbulkan situasi merugikan bagi masyarakat (Sary et al., 2021).

Sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi dua irisan yang saling berkaitan. Dalam konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sesungguhnya telah disajikan upaya untuk memutus rantai kemiskinan dan strategi permodalan strategis (Jalil et al., 2021). Model PEMP juga menekankan analisis program berdasarkan kebutuhan masyarakat yang bersifat *Bottom Up* bukan *Top Down*. Artinya, setiap program dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat, potensi yang ada (Sidiq et al., 2021), serta mempertimbangkan nilai kearifan lokal sebagai elemen penting bagian dari kehidupan bermasyarakat (Subagiana et al., 2018). Namun, dalam hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan. Jika dicermati, setiap program pemberdayaan masyarakat di pesisir lebih banyak dibangun dengan konsep *Top Down* bukan *Bottom Up*.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) memiliki desain *Bottom Up* dengan memperhatikan pada analisis kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan PEMP mengedepankan pendekatan berbasis partisipatif, kemitraan dan keswadayaan. Dalam mewujudkan setiap program yang telah disusun, ketiga pendekatan tersebut dapat memberikan implikasi pada berhasil atau tidaknya program (Hidayatun et al., 2022). Pendekatan partisipatif, berarti setiap elemen

masyarakat bergerak aktif dalam program, mulai dari tahap awal hingga evaluasi(Purnamasari et al., 2020). Sementara pendekatan kemitraan bertujuan dalam mengoptimalkan capaian dari sisi jaringan sosial(Widodo & Sidiq, 2019). Pemberdayaan pada prinsipnya merupakan usaha bersama sehingga setiap *stakeholder* memiliki tanggungjawab(Tjahjono et al., 2021) dalam memberdayakan kelompok tertentu berdasarkan potensi yang dimiliki(Rahmat & Mirnawati, 2020). Pendekatan partisipatif dan kemitraan yang diterapkan didukung dengan kekuatan (swadaya) dengan kemampuan sendiri untuk bangkit(I. Mulyadi, 2020).

Jika pada pendekatan terdiri dari tiga bagian, yakni partisipatif, kemitraan dan keswadayaan, maka bagian penting berikutnya yaitu prinsip pengelolaan yang hakekatnya bahwa setiap proses dalam pemberdayaan tersebut harus terbuka, dapat dipertanggungjawabkan(Rahman et al., 2021), memberikan manfaat bagi masyarakat serta berdasarkan azas musyawarah mufakat(Purnawati et al., 2022). Prinsip pendekatan dan pengelolaan yang berbasis pada masyarakat hendaknya tidak hanya sebagai dasar teori melainkan diterapkan dalam konteks lapangan. Pada konteks pengelolaan Bandar Bakau tidak seluruh komponen baik pendekatan maupun prinsip pengelolaan sebagaimana perspektif teori berjalan optimal. Hasil penelitian ditemukan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan tidak seluruhnya bersifat *Bottom Up*.

Desain program dan kegiatan lebih banyak bersumber dari rekomendasi aktor baik pemerintah maupun aktor lokal seperti tokoh penggerak maupun kelembagaan setempat. Hal ini kemudian berdampak pada kegagalan program maupun hasil yang tidak optimal ketika program tersebut dijalankan. Sebagai contoh, pengembangan kawasan Bandar Bakau menjadi ekowisata seharusnya didukung dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki. Namun, di lapangan ditemukan bahwa potensi tersebut tidak dikembangkan optimal. Potensi lokal seperti legenda Putri Tujuh, kesenian, dan produk usaha kreatif masyarakat hanya menjadi pelengkap yang tidak diberikan ruang lebih untuk menarik wisatawan. Padahal dengan letak yang strategis keseluruhan potensi tersebut seharusnya dapat dikembangkan menjadi paket wisata unggulan untuk skala nasional maupun

internasional.

Masalah lain yang berkaitan dengan ketidaksamaan persepsi antar aktor dan masyarakat tampak jelas mengganggu aktivitas pengelolaan Bandar Bakau. Perbedaan kepentingan antar aktor lokal (seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua kelembagaan) memberikan implikasi pada terhentinya aktivitas ekowisata Bandar Bakau, seperti Sekolah Alam. Di sisi lain, daya dukung Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur ekowisata Bandar Bakau tampak lemah diantaranya *tracking* putus terkena abrasi yang belum diperbaiki. Bila menelisik penerapan paradigm PEMP, maka ada hal-hal yang tampak berbeda. PEMP menunjukkan sinergi, kerjasama, dan kolaborasi yang sejalan antara berbagai pihak untuk kepentingan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan yang dilakukan, tidak ditemukan pembangunan berbasis paradigm PEMP, mulai dari tahap sosialisasi hingga implementasi kegiatan. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Kepariwisata telah berupaya mengembangkan potensi yang ada dengan pembangunan infrastruktur serta promosi, ini belum dilakukan dengan optimal. Pada akhirnya, tujuan PEMP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai melalui pengelolaan ekowisata Bandar Bakau. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan merujuk pada konsep PEMP agar tercapai masyarakat berdaya dari sisi sosial maupun ekonomi.

Tabel 2. Strategi Pemberdayaan Berbasis PEMP

| Strategi Internal | Strategi Eksternal |
|---|--|
| 1. Menyamakan persepsi arah/desain pengembangan ekowisata Bandar Bakau antar aktor dan masyarakat berdasarkan prinsip PEMP. | 1. Melibatkan swasta dari perusahaan yang beroperasi di sekitar Bandar Bakau dalam pengelolaan maupun menghimpun permodalan. |
| 2. Merumuskan konsep/desain arah pengembangan ekowisata Bandar Bakau secara berkelanjutan berbasis masyarakat. | 2. Mengembangkan jejaring kemitraan baik nasional maupun internasional melalui paket wisata budaya dan alam. |
| 3. Merombak dan menyusun ulang kelembagaan yang mengurus Bandar Bakau. | 3. Promosi wisata dengan menggandeng bisnis pariwisata seperti agen <i>travel</i> dan media masa. |
| 4. Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat melalui skema permodalan serta pelatihan berkelanjutan. | |

| | |
|--|---|
| 5. Memprioritaskan masyarakat lokal tempatan dalam mengakses tempat usaha maupun pengembangan usaha. | 4. Melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan manajemen pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan. |
| 6. Promosi berbasis digital. | |
| 7. Penerapan konsep CHSE (Clean, Healty, Safety, and Environmental). | |

Sumber: Hasil Analisis Lapangan (2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan ekowisata Bandar Bakau yang menyebabkan target mewujudkan masyarakat berdaya dari sisi sosial ekonomi belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh praktik pelaksanaan program pemberdayaan yang belum benar-benar mengimplementasikan masyarakat sebagai aktor sekaligus subjek utama. Berdasarkan pembedahan menggunakan prinsip PEMP yang seharusnya menerapkan paradigma pemberdayaan berbasis *Bottom Up*, maka selama ini ada kecenderungan prinsip ini masih lemah. Implementasi program lebih banyak menggunakan paradigma *Top Down*, dengan pelibatan aktor lokal di berbagai tahapan seperti perencanaan dan penerapan program. Strategi berbasis PEMP dilakukan melalui sejumlah tahapan. *Pertama*, memperbaiki struktur dan menata kembali kelembagaan yang ada. *Kedua*, penyamaan persepsi tentang PEMP diantara aktor dan stakeholder. *Ketiga*, menjunjung tinggi musyawarah dan nilai-nilai gotong royong serta pengembangan partisipasi masyarakat. Strategi ini dapat memberikan dampak positif jika diimbangi dengan konsistensi dukungan dari segi peningkatan kapasitas, permodalan, serta manajemen bisnis berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2022). Dimensi Sosial dalam Pengembangan Masyarakat di Wilayah Pesisir. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4985–4994. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.4054>
- Agung, Y. R., Yahya, Fuaturosida, R., Ahda, M. N. F., Khotimah, K., & Hidayat, S. (2022). Peran Modal Sosial sebagai Solusi Konflik Pasca Gempa Bumi. *Journal of Indonesian Psychological Science*, 2(1), 78–98.
- Andeas, & Savitri, E. (2016). *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten*

Meranti dan Rokan Hilir. Pustaka Sahila.

- Hidayatun, N., Jalil, A., & Sidiq, R. S. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Usaha Ikan Kering dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1185–1190.
- Jalil, A., Yesi, Y., & Sugiyanto, S. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Produk Dodol Nenas di Desa Tanjung Leban Bengkalis. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1–8.
- Junaidin, & Mas'ad. (2017). Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Dusun Taman Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. *International Journal of Nature Science and Engineering*, 1, 16–27.
- Manaf, C. Y. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. *FairValue: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 1238–1251.
- Mulyadi, A., Efriyeldi, & Marbun, B. (2021). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Bandar Bakau Dumai Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 8(1), 48–56. <https://doi.org/10.31258/dli.8.1.p.48-56>
- Mulyadi, I. (2020). Potensi dan Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Lahan Gambut: Studi Pendekatan Kehidupan Berkelanjutan di Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. *Jurnal Komunitas*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v11i1.1951>
- Novengging, N. D. (2021). Peran Kelompok Sadar Wisata Sri Sentono Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nuzhul Dwy Novengging. *Journal of Community Development and Disaster Management Vol*, 3(1), 59–70.
- Purnamasari, V., Qurrata, V. A., & Narmaditya, B. S. (2020). Pemberdayaan Wanita Melalui Peluang Usaha dalam Peningkatan Ekonomi Lokal. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(1), 1–8.
- Purnawati, E., Nugroho, I. A., Syafa'at, A. Y., & Sari, F. D. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Produktif terhadap Produk Lokal Tanggap Covid-19 Kelompok Usaha Bersama Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (PIMAS)*, 1(1), 1–9.
- Rahman, A., Rohim, A. N., Septi, A. R. L., Ansori, K., Byzura, S. A., & Sekarwati, D. A. (2021). Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Desa Girirejo Melalui Program Wiradesa. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 22(2), 208–221. <https://doi.org/10.31315/jdse.v22i2.6381>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>

- Sary, D. V., Prayuda, R., Rahman, K., & Sundari, R. (2021). Identifikasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 136–157. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2705>
- Sidiq, R. S. S., Susanti, R., Widodo, T., & Sugiyanto, S. (2021). Pemberdayaan Petani Gambut Melalui Pemanfaatan Cyber Extencion di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar. *Education and Development*, 9(4), 380–384.
- Subagiana, I. G., Artatanaya, I. G. L. S., & Wijayati, N. L. M. (2018). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif). *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(2), 92–98.
- Takarendehang, R., Sondak, C. F. ., Kaligis, E., Kumampung, D., Manembu, I. S., & Rembet, U. N. W. . (2018). Kondisi Ekologi dan Nilai Manfaat Hutan Mangrove di Desa Lansa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Pesisir Dan Laut Tropis*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.35800/jplt.6.2.2018.21526>
- Taroreh, K., Ruru, J. M., & Londa, V. Y. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Halmahera Barat Kecamatan Jailolo Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(116), 63–73.
- Tjahjono, W. S., Murdiyanto, E., & Widayanto, B. (2021). Strategi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata di Kawasan Hutan Lindung. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 22(1), 103–113. <https://doi.org/10.31315/jdse.v22i1.5377.g3800>
- Triyani, R., & Firdaus, M. (2016). Tingkat Kesejahteraan Nelayan Skala Kecil dengan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(1), 29–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3170>
- Widodo, T., & Sidiq, R. S. S. (2019). Pemberdayaan Kelompok UMKM Keripik Nenas dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 1–10.